

RINGKASAN

**ELYA FITRI
(200510131)**

ANALISIS HUKUM UJARAN KEBENCIAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

(Dr. Yusrizal, S.H., M.H dan Hidayat, S.H., M.H)

Ujaran kebencian adalah ucapan, perilaku, tulisan, atau pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu kekerasan dan prasangka di pihak pelaku pernyataan atau korban. Pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, yaitu mengkaji norma ketika dalam penerapannya terdapat ketidakjelasan norma, baik karena terjadinya kekosongan norma, kekaburan norma, maupun pertentangan norma dengan menggunakan bahan hukum kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran kebencian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c dan penanganan hukum kasus ujaran kebencian tidak diatur secara khusus, oleh karena itu diperlukan kolaborasi dengan peraturan atau undang-undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Pada akhir penelitian ini, disimpulkan bahwa hal utama yang menyebabkan kasus ujaran kebencian tidak berhenti pada masa pemilihan umum adalah karena tidak adanya aturan khusus yang mengatur Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum terkait Ujaran Kebencian.

Kata kunci: Ujaran kebencian, Undang-Undang, Media sosial.

SUMARRY

**ELYA FITRI
(200510131)**

***LEGAL ANALYSIS OF HATE SPEECH BASED ON
LAW NUMBER 7 OF 2017 CONCERNING GENERAL
ELECTIONS***

(Dr. Yusrizal, S.H., M.H dan Hidayat, S.H., M.H)

Hate speech is speech, behavior, writing, or performance that is prohibited because it can trigger violence and prejudice on the part of the perpetrator of the statement or the victim. General election is an instrument to realize people's sovereignty.

This research is conducted in a normative juridical manner, namely examining norms when in their application there is a lack of clarity of norms, either due to the occurrence of a norm vacuum, norm vagueness, or conflict of norms by using library legal materials which include primary legal materials and secondary legal materials.

The results of the research show that hate speech in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections is regulated in Article 280 paragraph (1) letter c and the legal handling of hate speech cases is not specifically regulated, therefore collaboration with regulations or laws such as the Criminal Code (KUHP), Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronics, and General Election Commission Regulation Number 15 of 2023 concerning General Election Campaigns is required.

At the end of this research, it is concluded that the main thing that causes hate speech cases to not stop during the general election period is due to the absence of specific rules governing Law Number 7 on General Elections related to Hate Speech.

Keywords: Hate Speech, Law, Social Media.